

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong perekonomian suatu daerah sehingga ekonomi di daerah tersebut meningkat, sehingga tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat didalam suatu daerah. Pemberian otonomi daerah yang seluas luasnya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi fiskal bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing masyarakat. (Putri & Darmayanti, 2019).

Menurut *United Nations Development Progame* (2020) Pembangunan manusia adalah sebuah proses dan hasil yaitu proses memperbesar pilihan orang tetapi juga menjadi tujuan. Pembangunan manusia mengimplikasikan bahwa orang harus mempengaruhi proses yang membentuk kehidupan mereka. Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana penting bagi pembangunan manusia, namun tidak pada akhirnya. Pembangunan manusia adalah pengembangan masyarakat melalui pembangunan kemampuan manusia, oleh masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses yang membentuk kehidupan dan masyarakat dengan memperbaiki kehidupan mereka. Ini lebih luas daripada pendekatan lain, seperti pendekatan sumber daya manusia, pendekatan kebutuhan dasar dan pendekatan kesejahteraan manusia. Indeks Pembangunan Manusia gabungan (IPM) mengintegrasikan tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Harapan hidup saat lahir mencerminkan

kemampuan untuk menjalani hidup yang panjang dan sehat. Tahun bersekolah dan tahun-tahun sekolah yang diharapkan mencerminkan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Dan pendapatan nasional bruto per kapita mencerminkan kemampuan untuk mencapai standar kehidupan yang layak. (Siswanti & Hermawati, 2018).

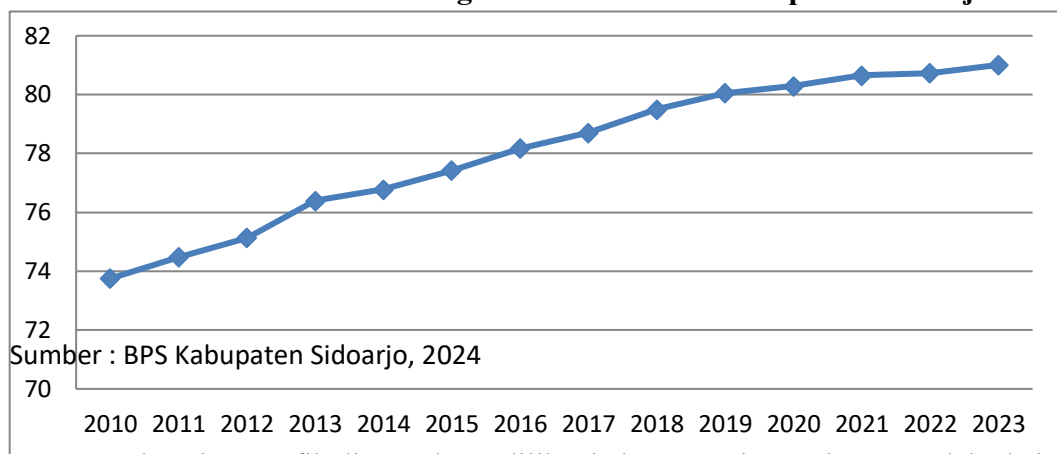
Dalam prakteknya untuk menciptakan pembangunan manusia yang tinggi diperlukan peran pemerintah sebagai regulator sehingga pemerataan pembangunan pada masing masing daerah dapat berjalan dengan baik. Kemudian melalui desentralisasi fiskal pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah otonomi untuk mengurus daerahnya sendiri yang kemudian di atur melalui Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah sehingga terjadinya percepatan dalam pembangunan daerah untuk menciptakan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

United Nations Development Progame memperkenalkan penghitungan baru pada tahun 2010 karena metode sebelumnya dianggap sudah tidak relevan atau sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan Indeks Pembangunan Manusia maka dapat diketahui capaian pembangunan manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2014 BPS menjawab perubahan tersebut dengan merubah metode lama dengan metode baru dan melakukan *backcasting* pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2010. (Badan Pusat Statistik, 2020).

Setiap tahunnya Badan Pusat Statistik merilis capaian Indeks Pembangunan Manusia di pada Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang tentu saja berbeda beda capaian Indeks Pembangunan Manusia Setiap Tahunnya. Peningkatan dan

penurunan capaian Indeks Pembangunan Manusia dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti Peran Pemerintah, APBD dan capaian pada bagian Pendidikan, Kesehatan dan Kualitas hidup masyarakat. (Ariza, 2016). Berikut disajikan grafik Indeks Pembangunan Kabupaten Sidoarjo :

Grafik 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sidoarjo

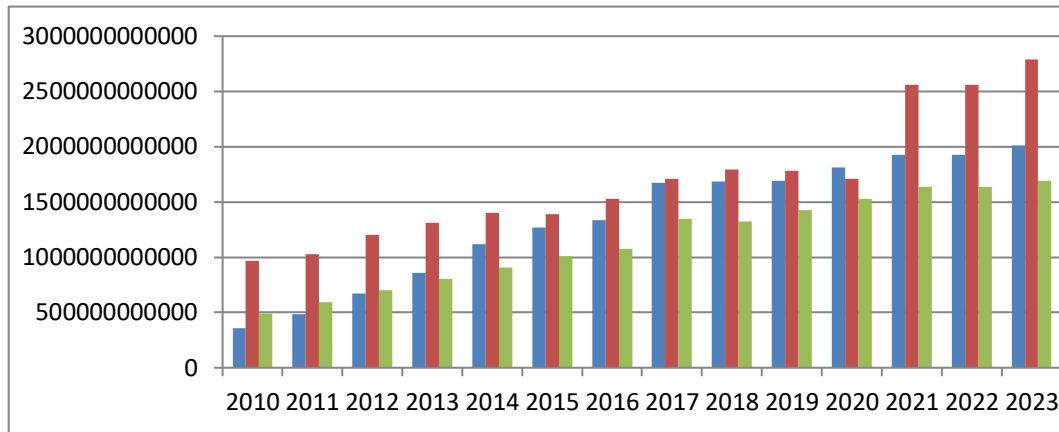


Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa capaian Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Sidoarjo terus mengalami kemajuan. IPM Sidoarjo meningkat dari 73,75 pada tahun 2010 menjadi 80,01 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,82 persen poin per tahun dan masih bertahan di level “tinggi”. Namun, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Sidoarjo. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 80,29 atau tumbuh 0,30 persen poin, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Adapun capaian tahun 2021, IPM Sidoarjo mencapai 81,01 poin atau tumbuh sebesar 0,65 persen poin terhadap tahun 2023.

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi serta penerimaan lain yang sah dan bisa dikenakan pada tiap individu ataupun badan usaha baik pemerintah maupun swasta. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

dapat berakibat pada meningkatnya kinerja keuangan pemerintah. Dana Perimbangan merupakan dana yang terdiri dari DBH pajak serta tidak pajak juga Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus adalah dana transfer yang berasal daripada pemerintah pusat pada pemda guna memberi biaya lebih pada komponen belanja daerah. Jika realisasi belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, dapat menyebabkan devisa sehingga dalam menutupi kurangnya belanja daerah pemerintah pusat menyerahkan transfer dana berupa dana perimbangan ke pemerintah daerah secara langsung melalui APBN yang kemudian disebut sebagai APBD. Apabila besaran dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat ke Pemerintah daerah lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut masih bergantung pada peran pemerintah untuk menutupi *fiscal gap* sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal (Anggreni & Artini, 2019). PAD dan Dana Perimbangan merupakan komponen penting dalam Penerimaan Daerah yang kemudian di belanjakan untuk keperluan daerah, melalui desentralisasi fiskal diharapkan Pemerintah Mampu untuk mengelolanya sehingga dapat mempercepat dan meratanya pembangunan daerah. Berikut grafik yang menunjukkan besaran dana PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2010 sampai 2021 :

Grafik 1. 2 PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan, (2024).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa komponen PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun berbeda dengan komponen Dana Perimbangan yang mengalami fluktuasi berarti bahwa terdapat peningkatan dan juga penurunan terhadap Dana Perimbangan. Dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah kabupaten Sidoarjo Cukup baik karena pada Tahun 2020 Komponen PAD lebih tinggi dari pada Dana Perimbangan yang artinya ketergantungan fiskal kabupaten Sidoarjo terhadap Pemerintah berkurang. Indeks Kemandirian Fiskal kabupaten Sidoarjo saat ini berada pada 40% yang artinya kabupaten Sidoarjo menuju ke Kategori Menuju Mandiri dalam Kemandirian Fiskalnya.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan

akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta bangunan yang berkelanjutan. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, pemerintah juga menetapkan anggaran minimal 20% dari APBN yang kemudian melalui APBD sebagai wujud realisasinya hal ini telah diatur dalam Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945. (Pake, Kawung & Luntungan, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti bermaksud untuk mengetahui ada atau tidaknya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 14 tahun yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 2023. Peneliti juga memilih kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian karena terdapat *Gap Research* yaitu dimana komponen Pendapatan dan IPM mengalami fluktuasi, sehingga mendorong peneliti untuk mengetahui apakah peningkatan dan penurunan kinerja keuangan pemerintah mempengaruhi peningkatan dan penurunan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian peneliti menambahkan variabel dari sisi pengeluaran yaitu Pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu komponen pembentuk dalam Indeks Pembangunan Manusia. mempengaruhi peningkatan dan penurunan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga bukan dari sisi penerimaannya saja tetapi juga luaran dari penerimaan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah Pengeluaran Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengeluaran Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penyusunan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sidoarjo” ditentukan dengan menggunakan Variabel Independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Bidang Pendidikan. Variabel Dependen yaitu, Indeks Pembangunan Manusia.

1.5. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, menambah pengetahuan serta pemahaman dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Bagi Pemerintah Daerah diharapkan penelitian ini memberikan masukan mengenai keuangan daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mengambil tindakan yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya di ukur melalui Indeks Pembangunan Manusia.

- 1 Bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melakukan pengembangan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.